

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan menerima estafet kepemimpinan bangsa dimasa yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa bergantung pada baik buruknya kondisi anak saat ini sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap hak-hak anak. Permasalahan terkait perlindungan hak anak salah satunya adalah fenomena perkawinan anak. Perkawinan anak merupakan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berusia kurang dari 19 tahun (UU No. 16 Tahun 2019). Indonesia menjadi negara dengan posisi ke-7 dalam kasus perkawinan anak di dunia dengan jumlah 1.781.000 kasus (Girls Not Brides, 2022). Posisi tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi perkawinan anak di Afrika dan Amerika Latin. Di Indonesia, 16% anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun dan 2% sebelum berusia 15 tahun. Sedangkan untuk anak laki-laki, sekitar 5% telah menikah sebelum berusia 18 tahun (Girls Not Brides, 2022).

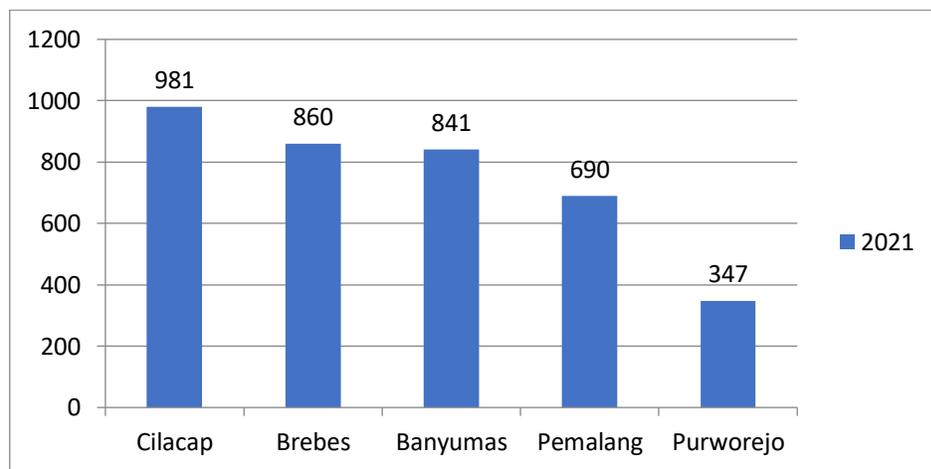
Perkawinan anak di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan batas minimal usia perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi perkawinan anak di Indonesia tidak serta-merta memperbolehkan perkawinan anak. Orang tua yang akan menikahkan anaknya di

bawah usia 19 tahun perlu mengajukan dispensasi kawin sebelum akhirnya diberi izin menikah. Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan agama kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu atau kedua orang tua memperlai mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama disertai dengan bukti-bukti yang mendukung untuk dilangsungkannya perkawinan.

Selain perubahan batas minimal usia menikah, dispensasi kawin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari perkawinan anak, karena pengajuan perkawinan di bawah umur diberlakukan syarat dan alasan yang cukup rumit. Namun, upaya tersebut ternyata tidak mengurangi praktek perkawinan anak di Indonesia. Justru dengan adanya perubahan tersebut pengajuan dispensasi perkawinan anak di Indonesia meningkat drastis hingga lima kali lipat atau 513%. Pengajuan dispensasi kawin di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 23.126 meningkat di tahun 2020 menjadi 64.211 (Databoks 2022; KOMNAS Perempuan 2021).

Perkawinan anak di Indonesia hampir terjadi di seluruh provinsi, dari 34 provinsi terdapat 22 provinsi dengan angka proporsinya berada di atas angka rata-rata nasional. Data BPS mengenai proporsi perempuan usia 20-24 yang berstatus kawin sebelum usia 18 tahun menunjukkan beberapa provinsi besar di Pulau Jawa masuk dalam peringkat jumlah perkawinan anak tertinggi salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah dengan angka proporsi sebesar 9,75 persen (BPS, 2021). Padahal jika

dilihat dari aspek geografis, budaya, dan sosio ekonominya, Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang cukup maju di Indonesia. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan angka perkawinan anak di Jawa Tengah mengalami kenaikan, pada tahun 2019 perkawinan anak di Jawa Tengah sebesar 5.329 kasus, namun pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan menjadi 12.972 dan 13.595 kasus.



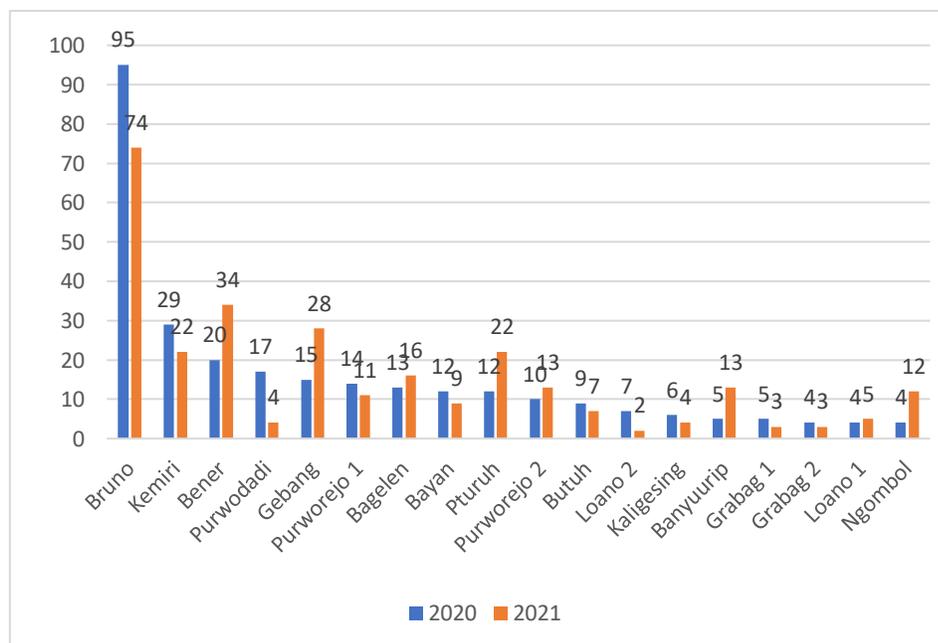
Gambar 1.1. Grafik Daerah di Provinsi Jawa Tengah yang Memiliki Angka Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun (2021)

Sumber: DP3AKB Provinsi Jawa Tengah

Salah satu wilayah yang memiliki angka perkawinan tinggi adalah Kabupaten Purworejo dengan jumlah 347 kasus. Kabupaten Purworejo dipilih karena Kabupaten Purworejo merupakan kabupaten dengan jumlah desa terbanyak di Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan pernyataan UNICEF dan penelitian yang dilakukan oleh Kumari & Shekhar (2023), yaitu anak perempuan di daerah pedesaan dua kali lebih mungkin untuk menikah sebelum berumur 18 tahun dibandingkan dengan anak perempuan dari

daerah perkotaan, peluang perkawinan anak lebih tinggi di pedesaan. Hal ini perlu adanya pencegahan perkawinan anak sedari awal sebagai langkah preventif menekan angka perkawinan anak dari berbagai *Stakeholder* karena Kabupaten Purworejo memiliki peluang besar mengalami perkawinan anak.

Perkembangan angka perkawinan anak sendiri di Kabupaten Purworejo cenderung fluktuatif antara tahun 2020 hingga tahun 2022. Data angka perkawinan dari DP3AKB Provinsi Jawa Tengah menunjukkan angka perkawinan anak di Purworejo pada tahun 2020 sebesar 314, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 347. Angka perkawinan anak di Kabupaten Purworejo berdasarkan kecamatan adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2 Grafik Perkawinan Dibawah Usia 19 Tahun Kabupaten Purworejo Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2021
Sumber: Kemenag Purworejo, 2023

Dari 18 kecamatan di Kabupaten Purworejo, kecamatan dengan angka perkawinan tertinggi adalah Kecamatan Bruno, yaitu sebesar 95 kasus pada tahun 2020 dan 75 kasus pada tahun 2021.

Tabel 1.1 Data Dispensasi Kawin Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo

| No | Tahun | Jumlah Dispensasi Kawin |
|----|-------|-------------------------|
| 1. | 2020 | 21 orang |
| 2. | 2021 | 22 orang |
| 3. | 2022 | 95 orang |

Sumber: Mustahal, 2023

Data dispensasi kawin menunjukkan bahwa pengajuan perkawinan dibawah umur di Kecamatan Bruno mengalami peningkatan, yaitu sebesar 95 orang pada tahun 2022 dan jumlah ini merupakan tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Purworejo. Penyebab meningkatnya dispensasi kawin di Kecamatan Bruno menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Mustahal (2023) adalah mayoritas disebabkan oleh Kehamilan Tidak Terduga (KTD), faktor tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi orang tua yang rendah, budaya dan kepercayaan masyarakat setempat, serta perubahan peraturan mengenai batas minimal usia menikah.

Selain dispensasi kawin, pemerintah juga melakukan berbagai program pencegahan perkawinan anak. Sahya Anggara (2014: 225) menjelaskan dalam mencapai keberhasilan pembangunan mutlak diperlukan pendekatan partisipatif. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan individu dalam mewujudkan tujuan kelompok (Cohen dan Uphoff, 1980). Mardikanto & Soebiato (2017: 88-90)

menjelaskan partisipasi masyarakat menurut jenisnya terdiri dari partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi informatif, partisipasi konsultatif, partisipasi intensif, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan partisipasi mobilisasi (mandiri).

Partisipasi masyarakat terhadap pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Bruno masih tergolong dalam jenis partisipasi pasif/manipulatif, yaitu keterlibatan masyarakat yang hanya sekedar diberi tahu apa yang sedang terjadi tanpa mempertimbangkan tanggapan dari masyarakat (Mardikanto & Soebiato, 2017: 88). Menurut informasi dari Plt BKKBN Kecamatan Bruno, Bapak Viandis, partisipasi masyarakat secara kelembagaan di masyarakat belum ada, masyarakat berpartisipasi melalui edukasi dalam forum pertemuan tingkat desa yang kemudian dalam forum tersebut dimasukkan materi dan pesan-pesan berkaitan dengan pendewasaan usia perkawinan anak.

Rendahnya Partisipasi Masyarakat di daerah-daerah dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Nurdin terdapat tiga aspek yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu ekonomi dilihat dari aspek tingkat pendapatan dan lapangan kerja masyarakat setempat, sosial budaya berkaitan dengan perbedaan sosial budaya yang berkembang di masyarakat, meliputi cara berfikir, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan, serta geografi berupa jarak dan letak tempat tinggal seseorang dari pusat perkotaan (Anderson et al., 2022)

Dari beberapa alasan tersebut, budaya masyarakat menjadi salah satu penentu partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan, salah satunya adalah pelaksanaan

pengecehan perkawinan anak. Dalam hal ini, budaya masyarakat menunjukkan adanya peran cara berfikir dan bersikap masyarakat terhadap perkawinan. Selain itu, Budaya masyarakat berkaitan dengan pandangan, sikap dan perilaku manusia terhadap isu-isu perkawinan anak (Anderson et al., 2022). Pola sikap dan perilaku tersebut menjadi ciri partisipasi masyarakat dalam perkawinan anak yang tercermin dari pola pengetahuan dan pemahaman mengenai partisipasi masyarakat, keterbukaan terhadap perubahan, daya tanggap dan keterampilan untuk diterapkan dalam bentuk partisipasi masyarakat.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pengetahuan yang berkualitas akan mendasari seseorang untuk bersikap dan bertindak dalam suatu kegiatan. Pengetahuan merupakan dasar seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan ataupun amalan. Dengan demikian, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh budaya masyarakat berupa perilaku masyarakat dalam menyikapi perkawinan anak, karena budaya yang baik akan melahirkan sikap yang baik. Syamaun (2019: 85) menyatakan bahwa kebudayaan akan membentuk, memperkuat dan mengubah sikap perilaku individu maupun sosial. Artinya, pengaruh yang kuat dari nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat secara tidak langsung akan membentuk sikap masyarakat pula.

Budaya masyarakat yang berkembang terkait dengan perkawinan anak di Kecamatan Bruno adalah adanya stigma "*Prawan Tua*", dimana anak yang sudah tidak bersekolah lebih cenderung memilih untuk menikah atau dinikahkan agar tidak

mengganggu di rumah, anjuran agama terkait usia menikah yang tepat adalah datangnya menstruasi pertama bagi anak perempuan, dan agar terhindar dari hal-hal negatif, seperti pergaulan bebas antara remaja laki-laki dan perempuan, kedekatan remaja laki-laki dan perempuan yang terlalu dekat, atau bahkan Kehamilan di luar nikah. Selain itu, budaya patriarki masyarakat berupa adanya anggapan bahwa seorang anak perempuan tidak perlu berpendidikan karena akan mengurus rumah tangga. Faktor lingkungan sekitar berupa tetangga atau teman yang telah menikah muda sehingga mendorong individu anak untuk cepat-cepat menikah juga (Rafidah, et al., 2009; Mustahal, 2023; Lorinda et al, 2023).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anderson et al. (2022) menyatakan bahwa terdapat pengaruh budaya terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Provinsi Jambi, dimana indikator yang digunakan adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penelitian oleh Pandebesie, Indrihastuti, dan Wilujeng (2019) juga menyatakan sosial budaya, berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam *Sustainable Forest Management*. Selain itu Rahman, Sididi, Yusriani (2020) pengetahuan dan sikap memiliki hubungan yang positif terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Aspek lainnya yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi sosial ekonomi berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam suatu kelompok masyarakat beserta dengan hak dan kewajiban yang harus dijalankannya. Menurut Cohen dan Uphoff (1980), kondisi sosial ekonomi

dapat dilihat dari usia dan jenis kelamin, status keluarga, tingkat pendidikan, pembagian sosial, pekerjaan, tingkat pendapatan, lama tinggal dan jarak, serta status kepemilikan rumah.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Bruno menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan anak. Orang tua dengan tingkat pendidikan rendah beresiko 1,25 kali lebih besar untuk menikahkan anaknya pada usia kurang dari 20 tahun (Rafidah, et al., 2009; Mustahal, 2023). Rendahnya pendidikan orang tua memberikan anggapan bahwa anak perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi dan lebih memilih melangsungkan pernikahan. Tingkat pendapatan orang tua yang rendah berkaitan dengan kemampuan orang tua dalam membiayai sekolah putra-putri mereka (Lorinda et al, 2023). Keterbatasan biaya pendidikan tersebut mengakibatkan putus sekolah sehingga mendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka agar memiliki kesibukan (Lorinda et al., 2023). Pekerjaan orang tua juga berpengaruh terhadap perkawinan anak, orang tua yang tidak bekerja beresiko 1,48 kali lebih besar menikahkan anak mereka dibandingkan dengan orang tua yang bekerja (Rafidah et al, 2009).

Penelitian terdahulu oleh Anisa dan Juliannisa (2022) menyatakan bahwa tingkat pendapatan dan pekerjaan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Berencana di Kota Bekasi. Penelitian yang dilakukan oleh Savari, Damaneh, dan Damaneh (2020) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap *Sustainable Forest Management*. Dari penjelasan tersebut

terdapat hubungan antara tingkat pendidikan, pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Orang tua dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang tinggi, serta memiliki pekerjaan menurunkan resiko terjadinya perkawinan anak. Oleh karena itu, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya tetapi kondisi sosial ekonomi yang dimiliki masyarakat. Menurut Mazmanian & Sabatier, kondisi sosial ekonomi menjadi tolok ukur mengenai tingkat pemahaman dan keterbukaan masyarakat terhadap program, masyarakat yang telah terbuka dan terdidik akan mudah menerima suatu program dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.

Menurut Darjono (dalam Sastropetro, 1986: 22) menyatakan bahwa keberhasilan partisipasi masyarakat secara menyeluruh dipengaruhi oleh aspek budaya, kebiasaan, tradisi, dan sistem nilai yang ada di masyarakat. Sedangkan menurut Cohen dan Uphoff (1980) menyatakan bahwa latar belakang individu untuk mendukung partisipasi masyarakat dilihat dari usia dan jenis kelamin, status keluarga, tingkat pendidikan, pembagian sosial, pekerjaan, tingkat pendapatan, lama tinggal dan jarak, serta status kepemilikan rumah.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Pandebesie, Indrihastuti, dan Wilujeng (2019) dan Anderson et al. (2022) menyatakan bahwa terdapat pengaruh budaya terhadap partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian menurut Savari, Damaneh, dan Damaneh (2020), Anisa dan Juliannisa (2022), Savari et al., (2020) menyatakan kondisi sosial ekonomi terutama pendapatan, pekerjaan, dan pendidikan

berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Akan tetapi beberapa penelitian menyatakan bahwa tingkat pendidikan (Anisa & Juliannisa, 2022) dan pendapatan tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat (Arifa et al., 2019; Zande & Mzuza, 2022).

Dari pernyataan di atas menyatakan bahwa budaya masyarakat dan kondisi sosial ekonomi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, namun terkait dengan perkawinan anak, budaya masyarakat dan kondisi sosial ekonomi merupakan faktor penyebab perkawinan anak yang paling dominan di Kecamatan Bruno. Selain itu, perkawinan anak apabila tidak diatasi dari awal memiliki dampak buruk bagi kesejahteraan anak maupun keluarga kedepannya. Dampak negatif yang dirasakan oleh perempuan adalah pada kesehatan reproduksinya, seperti peningkatan angka kematian ibu, kematian bayi, derajat kesehatan ibu dan anak yang rendah, serta potensi yang besar terjadinya bayi lahir stunting. Selain itu, dampak perkawinan anak secara sosial dapat meningkatkan masalah perekonomian keluarga atau meningkatkan potensi lahirnya keluarga miskin baru, meningkatkan angka perceraian, dan meningkatkan potensi terjadinya eksploitasi dan kekerasan pada anak.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Budaya Masyarakat dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Perkawinan Anak di Kecamatan Bruno”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Adakah pengaruh Budaya Masyarakat terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak di Kecamatan Bruno?
2. Adakah pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak di Kecamatan Bruno?
3. Adakah pengaruh Budaya Masyarakat dan Kondisi Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak di Kecamatan Bruno?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis apakah terdapat pengaruh dari Budaya Masyarakat terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak di Kecamatan Bruno.
2. Menganalisis apakah terdapat pengaruh dari Kondisi Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak di Kecamatan Bruno.
3. Menganalisis apakah terdapat pengaruh dari Budaya Masyarakat dan Kondisi Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak di Kecamatan Bruno.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bagi kepentingan akademis dapat memberikan informasi bagi pembaca serta sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan Administrasi Publik khususnya di bidang kajian partisipasi masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis berkaitan dengan Pengaruh dari Budaya Masyarakat dan Kondisi Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Bruno

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan yang membangun bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo pada umumnya dan Pemerintah Kecamatan Bruno, PLKB BKKBN Kecamatan Bruno, KUA Kecamatan Bruno dan Masyarakat Kecamatan Bruno pada khususnya.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan laporan penelitian dan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Universitas Diponegoro pada umumnya dan bagi mahasiswa program

studi Administrasi Publik pada khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Arifa et al., (2019) yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Bank Sampah Desa Nijang)” menyatakan bahwa aktor pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat, namun tingkat pendidikan dan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Penelitian oleh Yuliana & Wijjayanti (2019) dengan judul “Partisipasi Masyarakat pada Program Bank Sampah” menyatakan bahwa erdapat hubungan antara pengetahuan, sikap, perilaku memilah, fasilitas pemilah sampah, dan manfaat bank sampah dengan partisipasi masyarakat.

Penelitian oleh Rahman, Sididi, Yusriani (2020) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah” menyatakan bahwa tingkat pengetahuan dan sikap memiliki hubungan yang positif terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian oleh Dewi, Tan, dan Nazer (2021) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Bukittinggi”

menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang Kota Bukittinggi adalah jenis kelamin, usia, dan pendapatan.

Penelitian oleh Anisa dan Juliannisa (2022) dengan judul “Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi dalam Program Keluarga Berencana di Kota Bekasi” menyatakan bahwa tingkat pendapatan dan pekerjaan berpengaruh terhadap partisipasi dalam program keluarga berencana, sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap partisipasi dalam program keluarga berencana. Penelitian oleh Lubis et al. (2023) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Terhadap Minat Dalam Program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang” menyatakan bahwa kesadaran dan pengetahuan secara simultan mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap minat dalam program desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Samanta (2019) dengan judul “Factors Influencing Community Participation in Donor Funded Project: Experiences From Padep Community Projects in Morogoro District, Tanzania” menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proyek PADEP diantaranya adalah pengalaman seseorang, pendapatan rumah tangga, ukuran rumah tangga atau ketersediaan tenaga kerja, tingkat kepuasan, kesadaran dalam hal ini adalah pengetahuan dan informasi, serta aturan dan regulasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Pandebesie, Indrihastuti, dan Wilujeng (2019) dengan judul “Factors Influencing Community Participation in the Management of Household Electronic Waste in West Surabaya, Indonesia” menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kemauan masyarakat untuk mengelola *e-waste* adalah perilaku, sedangkan faktor yang mempengaruhi kemauan masyarakat untuk membayar lebih adalah perilaku, sikap dan pengetahuan. Penelitian oleh Savari, Damaneh dan Damaneh (2020) dengan judul “Factors Influencing Local People’s Participation in Sustainable Forest Management” menyatakan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan terhadap SFM adalah tingkat pendidikan. Selain itu faktor sosial budaya memiliki hubungan positif dan signifikan dengan partisipasi petani dalam SFM.

Penelitian yang dilakukan oleh Cheng et al. (2021) dengan judul “A Systematic Review of Factors Influencing Participation In Two Types of Malaria Prevention Intervention in Southeast Asia” menyatakan bahwa faktor kunci dari tingkat serapan penggunaan ITNs dan partisipasi MDA diantaranya adalah pengetahuan terkait intervensi tersebut dan sikap positif terhadap intervensi.

Penelitian oleh Zande dan Mzuza (2022) dengan judul “An Investigation of the Factors Influencing Community Participation in Forest Management: A Case of Balaka District, Malawi” yang menyatakan bahwa Hasil dari penelitian ini adalah kepuasan manfaat ekonomi dan kesadaran masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di di kawasan

hutan desa Kangankundi di Kabupaten Balaka, Malawi Selatan. Sedangkan tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat, tetapi memiliki korelasi positif. Penelitian oleh Anderson et al. (2022) dengan judul “The Role of Social Media and Community Culture and Their Effect on Community Participation in Village Development in Jambi Province” menyatakan bahwa peran media sosial dan budaya (diukur menggunakan indikator: pengetahuan, keterampilan, dan sikap) berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu lokasi penelitian yang dilaksanakan berada di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dengan aspek yang diteliti adalah terkait partisipasi masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak menggunakan metode kuantitatif. Variabel yang dilihat adalah budaya masyarakat, kondisi sosial ekonomi, dan partisipasi masyarakat. Hal ini belum ada penelitian yang sama yang meneliti terkait partisipasi masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Bruno menggunakan metode kuantitatif.

Tabel 1.2 Jurnal Penelitian Terdahulu

| No | Sitasi | Tujuan | Metodologi | Hasil |
|-----|---|---|-------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | (Arifa et al., 2019) “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Bank Sampah Desa Nijang)” | Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam program bank sampah Desa Nijang serta apakah faktor tingkat pendidikan, pengetahuan dan pendapatan berpengaruh terhadap peluang partisipasi masyarakat. | Kuantitatif | Hasil penelitian ini adalah faktor pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat, namun tingkat pendidikan dan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat. |
| 2. | (Yuliana & Wijayanti, 2019) “Partisipasi Masyarakat pada Program Bank Sampah” | Untuk menganalisis faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam program bank sampah di Kecamatan Ungaran Barat. | Kuantitatif | Hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan antara pengetahuan, sikap, perilaku memilah, fasilitas pemilah sampah, dan manfaat bank sampah dengan partisipasi masyarakat. |
| 3. | (Rahman et al., 2020) “Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah” | Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan sikap terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kampung Nelayan Untia Kota Makasar | Kuantitatif | Hasil penelitian ini adalah tingkat pengetahuan dan sikap memiliki hubungan yang positif terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. |

| No | Sitasi | Tujuan | Metodologi | Hasil |
|------------|---|---|----------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 4. | (Dewi et al., 2021) “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Bukittinggi” | Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat di Kota Bukittinggi | Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang Kota Bukittinggi adalah jenis kelamin, usia, dan pendapatan. |
| 5. | (Anisa & Juliannisa, 2022) “Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi dalam Program Keluarga Berencana di Kota Bekasi” | Untuk mengetahui pengaruh faktor sosial ekonomi, seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan pekerjaan memiliki pengaruh terhadap partisipasi program keluarga berencana di Kota Bekasi. | Kuantitatif | Hasil dari penelitian ini adalah tingkat pendapatan dan pekerjaan berpengaruh terhadap partisipasi dalam program keluarga berencana, sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap partisipasi dalam program keluarga berencana. |
| 6. | (Lubis et al., 2023) “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Terhadap Minat Dalam Program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang” | Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Desa Amplas pada Program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. | Kuantitatif | Hasil penelitian ini adalah kesadaran dan pengetahuan secara simultan mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap minat dalam program desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan. |
| 7. | (Samata, 2019) “Factors Influencing Community Participation in Donor Funded | Untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi | Kualitatif dan Kuantitatif | Hasil penelitian ini adalah faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proyek PADEP |

| No | Sitasi | Tujuan | Metodologi | Hasil |
|-----|--|---|--------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Project: Experiences From Padep Community Projects in Morogoro District, Tanzania” | partisipasi masyarakat dalam proyek masyarakat PADEP | | diantaranya adalah pengalaman seseorang, pendapatan rumah tangga, ukuran rumah tangga atau ketersediaan tenaga kerja, tingkat kepuasan, kesadaran dalam hal ini adalah pengetahuan dan informasi, serta aturan dan regulasi. |
| 8. | (Pandebesie et al., 2019) “Factors Influencing Community Participation in the Management of Household Electronic Waste in West Surabaya, Indonesia” | Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah elektronik | Kuantitatif Survei | Hasil penelitian ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kemauan masyarakat untuk mengelola <i>e-waste</i> adalah perilaku, sedangkan faktor yang mempengaruhi kemauan masyarakat untuk membayar lebih adalah perilaku, sikap dan pengetahuan. |
| 9. | (Savari et al., 2020) “Factors Influencing Local People’s Participation in Sustainable Forest Management” | Untuk menemukan faktor penentu partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan (SFM) di Iran | Kuantitatif | Hasil penelitian ini adalah faktor yang berpengaruh signifikan terhadap SFM adalah tingkat pendidikan. Selain itu faktor sosial budaya (partisipasi masyarakat lokal, perluasan metode konservasi hutan, dan sikap mendukung) memiliki hubungan positif dan signifikan dengan partisipasi petani dalam SFM. |

| No | Sitasi | Tujuan | Metodologi | Hasil |
|-----|---|---|------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 10. | (Cheng et al., 2021) “A Systematic Review of Factors Influencing Participation in Two Types of Malaria Prevention Intervention in Southeast Asia” | Untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penggunaan <i>insecticide-treated bed-nets</i> (ITNs) dan partisipasi individu dalam <i>Mass Drug Administration</i> (MDA) di Asia Tenggara | Literature Review | Hasil penelitian ini adalah faktor kunci dari tingkat serapan penggunaan ITNs dan partisipasi MDA diantaranya adalah pengetahuan terkait intervensi tersebut dan sikap positif terhadap intervensi. |
| 11. | (Zande & Mzuzza, 2022) “An Investigation of the Factors Influencing Community Participation in Forest Management: A Case of Balaka District, Malawi” | Untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di kawasan hutan desa Kangankundi di Kabupaten Balaka, Malawi Selatan | Kuantitatif Deskriptif | Hasil dari penelitian ini adalah kepuasan manfaat ekonomi dan kesadaran masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di kawasan hutan desa Kangankundi di Kabupaten Balaka, Malawi Selatan. Sedangkan tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat, tetapi memiliki korelasi positif. |
| 12. | (Anderson et al., 2022) “The Role of Social Media and Community Culture and Their Effect on Community Participation in | Untuk mengetahui pengaruh peran media sosial dan budaya terhadap partisipasi | Kuantitatif | Hasil penelitian ini adalah peran media sosial dan budaya (diukur menggunakan indikator: pengetahuan, keterampilan, dan |

| No | Sitasi | Tujuan | Metodologi | Hasil |
|------------|--|---|-------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | Village Development in Jambi Province” | masyarakat dalam pembangunan desa di Provinsi Jambi | | sikap) berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. |

Sumber: Diolah Peneliti, 2023

1.5.2. Administrasi Publik

Administrasi Publik menurut Chandler and Plano (1982: 1 dan 24) merupakan sebuah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk merumuskan, menerapkan, dan mengelola keputusan kebijakan publik. Stillman II (1991: 142-143), mengutip pengertian administrasi publik dari para ahli, yaitu:

1. Dimock, Dimock & Fox, administrasi publik adalah produksi barang dan jasa yang dibuat untuk melayani kebutuhan konsumen warga negaranya.
2. Barton & Chappell, administrasi publik adalah pekerjaan pemerintah, dimana pemerintah melakukan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan melibatkan karyawan/personel.
3. Straling, administrasi publik dianggap sebagai pencapaian pemerintah atau pencapaian pemerintah sesuai dengan janji kampanye pemilihan.
4. Nigro & Nigro, administrasi publik adalah usaha kooperatif antara tiga bidang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungan ketiganya. Selain itu, administrasi publik merupakan bagian dari proses politik karena memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan publik. Administrasi publik berbeda dengan administrasi swasta, namun memiliki kaitan yang erat dengan berbagai kelompok swasta dan individu dalam hal pemberian pelayanan publik.

5. Rosenbloom, administrasi publik adalah penggunaan teori-teori dan proses manajemen publik, politik, serta hukum dalam menjalankan mandate pemerintah eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk penyediaan fungsi pelayanan bagi masyarakat.
6. Nicholas Henry, administrasi publik adalah kombinasi antara teori dan praktik yang bertujuan untuk mengenalkan pemahaman mengenai pemerintah dan hubungannya dengan masyarakat. Selain itu, mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakatnya.

Berdasarkan definisi para ahli di atas, maka dapat disimpulkan administrasi publik merupakan ilmu atau seni yang berkaitan dengan pemerintahan dan warga negaranya, mulai dari merumuskan, menetapkan, dan mengelola kebijakan yang bermanfaat bagi kesejahteraan warga negaranya. Selain itu, administrasi publik merujuk pada pekerjaan birokrat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada warga negaranya.

1.5.2.1. Dimensi Administrasi Publik

Dimensi administrasi publik menurut Keban (2004) meliputi:

1. Dimensi kebijakan, melihat perumusan dan pencapaian tujuan dapat dilakukan melalui proses pembuatan keputusan.
2. Dimensi struktur organisasi berkaitan dengan pengaturan struktur dari pembentukan hingga pembentukan tugas antar bidang-bidang guna

mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu juga kewenangan dan tanggung jawabnya.

3. Dimensi manajemen berkaitan dengan proses pengelolaan kegiatan yang telah direncanakan agar dapat dilaksanakan melalui prinsip manajemen.
4. Dimensi etika menuntut mengenai moral seorang administrator.
5. Dimensi lingkungan berkenaan dengan suasana dan kondisi yang memiliki pengaruh pada setiap dimensinya.
6. Dimensi akuntabilitas kerja adalah dimensi yang paling menentukan keberhasilan dari administrasi publik. Hal ini dikarenakan, akuntabilitas memberikan bukti nyata kehadiran dan manfaat dari administrasi publik bagi suatu negara.

1.5.3. Partisipasi Masyarakat (Variabel Y)

Konsep partisipasi sudah lama dikenal dalam literatur keilmuan dan merupakan sebuah konsep yang luas dan penting. Salah satu indikator keberhasilan dari sebuah pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat, Keith Davis (1962) (dalam Sastropetro, 1985: 13) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan mental dan emosional individu di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan kelompok dan ikut bertanggung jawab terhadap usaha di dalamnya. Cohen dan Uphoff (1980) merumuskan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional individu maupun

kelompok yang mendorong mereka untuk berkontribusi mewujudkan tujuan kelompok dan bertanggung jawab atas keberhasilan tersebut.

Siti irene Astuti D. (2011: 326) menjelaskan partisipasi masyarakat adalah partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Sumarto (2009: 15) mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai proses dimana warga, sebagai individu dan kelompok sosial, mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Sedangkan menurut Isbandi (2007:27) (dalam Anggara, 2014: 223), partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan, dan pengambilan keputusan berkaitan dengan solusi untuk mengatasi masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi.

Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dengan memberikan sumbangan untuk ikut membantu menyelesaikan suatu permasalahan di lingkungan sekitarnya ataupun membantu program-program pemerintah agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.5.3.1. Dimensi Partisipasi Masyarakat

Indikator partisipasi masyarakat menurut Yadav (UNPADI, 1980) dalam (Mardikanto & Soebiato, 2017: 82) terdapat empat kegiatan yang menunjukkan sebuah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meliputi:

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan agar memungkinkan masyarakat dapat berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan sehingga terdapat pemerataan kebutuhan-kebutuhan masyarakat luas bukan hanya kelompok-kelompok kecil saja.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan diartikan sebagai keterlibatan masyarakat secara sukarela untuk menyumbangkan tenaga kerja, uang tunai, dan berbagai bentuk lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masyarakat tersebut.

c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Pada tahap pemantauan dan evaluasi pembangunan ataupun program kebijakan, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan perkembangan kegiatan dan perilaku aparat pembangunan, sehingga tujuan pembangunan dan program dapat tercapai serta

penanganan kendala-kendala yang ditemukan selama berjalannya pembangunan dan program kebijakan.

d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan sangat diperlukan karena seringkali kurang mendapat perhatian pemerintah dan administrasi pembangunan. Partisipasi masyarakat tersebut dimaksudkan agar terjadi pemerataan manfaat disetiap program pembangunan secara langsung.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya adalah bentuk partisipasi masyarakat menurut Josef Riwu (2002: 115) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat terjadi pada empat proses berupa partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, partisipasi dalam proses pelaksanaan, partisipasi dalam proses pemanfaatan, partisipasi dalam proses evaluasi. Menurut Cohen dan Uphoff (1980), jenis partisipasi utama yang memerlukan perhatian meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam implementasi, partisipasi dalam keuntungan, dan partisipasi dalam evaluasi (Cohen & Uphoff, 1980). Hetifah Sj. Sumarto (2009: 191-192) berpendapat bahwa tahapan-tahapan pembangunan dalam kaitan dengan partisipasi dapat berupa: tahap inisiasi, tahap perencanaan, tahap desain, tahap konstruksi, dan tahap operasional dan pemeliharaan.

Darjono dalam (Sastropetro, 1986: 21) menjelaskan mengenai bidang-bidang untuk partisipasi masyarakat, meliputi: dalam proses pengambilan keputusan dan/atau

proses perencanaan, dalam proses pelaksanaan program, dan dalam proses monitoring dan evaluasi terhadap program. Sedangkan menurut Taliziduhu Ndraha (1987: 103-104) menjelaskan bentuk atau tahapan partisipasi meliputi:

- a. Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain (*contac change*)
- b. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan
- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan
- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan
- f. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan hasilnya.

Dimensi partisipasi masyarakat yang digunakan untuk melihat Pelaksanaan pencegahan perkawinan anak adalah menurut Yadav (UNPADI, 1980), yaitu partisipasi dalam perencanaan atau pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, dan partisipasi dalam pemanfaatan.

1.5.3.2. Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat

Dusseldorp (1981) dalam (Mardikanto & Soebiato, 2017: 84) menerangkan berbagai bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat meliputi: 1) menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat; 2) melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok; 3) melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat lain; 4) menggerakkan sumberdaya masyarakat; 5) mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan; dan 6) memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat

Sedangkan menurut Keith Davis (Sastropetro, 1986: 16) mengemukakan jenis-jenis partisipasi masyarakat diantaranya adalah

- a. Pikiran
- b. Tenaga
- c. pikiran dan tenaga
- d. keahlian
- e. barang
- f. uang

1.5.3.3. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Meskipun dalam proses kebijakan publik saat ini telah menggunakan pendekatan partisipatif, namun pada dasarnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat melibatkan

banyak faktor pendukung, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan karakteristik dari individu/latar belakang pribadi individu yang mendukung terjadinya partisipasi. Menurut pendapat Cohen dan Uphoff (1980) ciri-ciri latar belakang terpenting yang perlu dianalisis adalah:

- a. Usia dan jenis kelamin
- b. Status keluarga
- c. Tingkat pendidikan
- d. Pembagian sosial
- e. Pekerjaan
- f. Tingkat pendapatan
- g. Lama tinggal dan jarak masyarakat dari proyek, layanan atau kegiatan
- h. Status kepemilikan tanah (Cohen & Uphoff, 1980)

Darjono dalam (Sastropetro, 1986:22) menjelaskan mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, diantaranya adalah:

- a. Pendidikan, diartikan sebagai kemampuan dalam membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan sosial dan kepercayaan diri
- b. Pengintrepretasian terhadap agama yang dangkal
- c. Kecenderungan untuk menyalah artikan motivasi, tujuan, dan kepentingan organisasi penduduk
- d. Tersedianya kesempatan kerja yang lebih baik di luar pedesaan

- e. Tidak adanya kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan

Santoso Sastropetro (1986: 41) menjelaskan bahwa unsur-unsur penting dan turut menentukan dalam partisipasi adalah:

- a. Komunikasi
- b. Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku
- c. Kesadaran yang didasarkan kepada perhitungan dan pertimbangan
- d. Antusiasme atau kesediaan melakukan sesuatu dari diri sendiri
- e. Rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama

Untuk dapat melaksanakan partisipasi secara efektif, persyaratan yang harus dilakukan menurut Keith Davis adalah:

- a. Waktu
- b. Dana perangsang
- c. Subjek partisipan harus relevan dengan organisasinya
- d. Memiliki kemampuan untuk berpartisipasi
- e. Kemampuan komunikasi timbal balik
- f. Bebas dalam melaksanakan peran sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan
- g. Tidak ada paksaan

Slamet (1985) dalam (Mardikanto & Soebiato, 2017: 91-94), tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ditentukan oleh:

- a. Kesempatan untuk berpartisipasi, kesempatan yang dimaksud diantaranya adalah: kesempatan politik, kesempatan memperoleh informasi, kesempatan memanfaatkan dan memobilisasi sumberdaya, kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi yang tepat guna, kesempatan untuk berorganisasi, dan kesempatan mengembangkan kepemimpinan.
- b. Kemampuan berpartisipasi, dari adanya kesempatan-kesempatan tersebut apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan maka kesempatan tersebut tidaklah berarti. Kemampuan yang dimaksud meliputi: kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan, kemampuan untuk melaksanakan pembangunan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan, dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Selain itu, faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat juga dapat dianalisis dari beragam disiplin keilmuan, diantaranya adalah: a) psikologi, dimana tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh motivasi, dorongan, kebutuhan, tekanan, keinginan, serta harapan-harapan; b) sosiologi, partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor kepentingan; c) pendidikan, partisipasi merupakan bentuk dari tanggapan atau respon; e) ekonomi, partisipasi masyarakat ditentukan besarnya peluang dan harga dari manfaat yang diperoleh.

- c. Kemauan untuk berpartisipasi, kemauan berpartisipasi dipengaruhi oleh sikap atau mental yang dimiliki masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kehidupannya.

Bintoro Tjokroamidjojo (1995: 226-228) menyatakan terdapat tiga hal penting yang mendapat perhatian administrasi pembangunan dalam rangka partisipasi, diantaranya adalah:

- a. Masalah kepemimpinan

Peran kepemimpinan dan kualitas kepemimpinan sangat menentukan terselenggaranya pembangunan. Dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan diperlukan pemimpin-pemimpin formal yang mempunyai legalitas dan pemimpin-pemimpin informal yang memiliki legitimasi.

- b. Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu aspek penting dalam administrasi pembangunan untuk lebih mendapatkan partisipasi. Gagasan-gagasan akan mendapatkan dukungan apabila diketahui dan dimengerti.

- c. Pendidikan/tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan yang memadai akan memberikan kesadaran yang lebih tinggi dalam berwarga negara dan memudahkan bagi pengembangan identifikasi terhadap tujuan-tujuan pembangunan yang bersifat nasional. Tingkat

pendidikan juga berarti tingkat kemampuan masyarakat untuk menyelenggarakan pembangunan.

Dari pernyataan para ahli tersebut, dapat menjadi landasan dalam penelitian ini untuk menganalisis Pengaruh Budaya Masyarakat dan Kondisi Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Anak di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

1.5.4. Budaya Masyarakat (Variabel X1)

Budaya atau *Budhayah* atau *Buddhi* dalam bahasa Sanskerta berarti budi dan akal. Menurut E. B. Taylor (dalam Sihotang, 2005: 12), budaya merupakan suatu keseluruhan kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lainnya serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. R. Linton mendefinisikan budaya sebagai bentuk dan hasil dari tingkah laku yang dipelajari, dimana unsur-unsur pembentuknya didukung dan turun temurun di anggota masyarakatnya (Sihotang, 2005: 12). Dengan demikian, budaya merupakan bentuk tingkah laku seseorang yang diperoleh dari pengetahuannya kemudian disetujui oleh kelompok masyarakat dan diturunkan kepada generasi ke generasi.

Budaya menurut (Hisyam, 2020: 179) adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Herskovits dan Malinowski menjelaskan bahwa segala sesuatu

yang berada di dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut (Hisyam, 2020: 192). Sedangkan Syamaun (2019: 85) menyatakan bahwa kebudayaan dapat membentuk, memperkuat dan mengubah sikap dan perilaku baik secara individu maupun sosial (Anderson et al., 2022). Artinya, terdapat pengaruh yang kuat dari nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat di suatu lingkungan tertentu secara tidak langsung akan membentuk sikap masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa budaya merupakan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keyakinan yang berkembang di masyarakat dan diturunkan ke generasi selanjutnya.

1.5.4.1. Parameter Budaya Masyarakat

Indikator yang digunakan untuk mengukur Budaya Masyarakat adalah pengetahuan dan sikap. Dalam proses transformasi budaya, akan terbentuk kognisi, yaitu pengertian, pengalaman, pengetahuan, pemahaman, kepercayaan, dan keyakinan yang selanjutnya akan diikuti oleh bentuk afeksi (perasaan), seperti senang, sedih, marah, takut, dll. Yang pada akhirnya akan membawa pada kesiapan untuk menerima atau menolak (sikap) (Syamaun, 2019: 85). Menurut Nurdin sosial budaya berkaitan dengan perbedaan sosial budaya yang berkembang di masyarakat, meliputi cara berfikir, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan (Anderson et al., 2022).

- a. Pengetahuan (*knowledge*) menurut Mubarak (2011) adalah segala sesuatu yang diketahui berdasarkan pada pengalaman seseorang dan akan bertambah sesuai

dengan pengalaman yang dialaminya (Darsini et al., 2019). Pengetahuan merupakan aspek dominan yang mendasari tindakan seseorang dan pengetahuan dapat diukur menggunakan wawancara atau angket dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden berkaitan dengan isi materi yang akan diukur.

- b. Sikap (*attitude*) menurut Wegener & Carlston (2005) (dalam Sa'diyah et al., 2018) adalah penilaian (evaluasi) terhadap suatu objek misalnya orang, objek-objek, peraturan dan ide (gagasan) dan sebagainya. Sikap juga dapat diartikan sebagai kecenderungan seseorang atau individu mereaksi suatu hal, orang, ataupun benda dilingkungan sekitarnya dengan suka atau tidak suka, acuh atau tidak acuh, dan setuju atau tidak setuju (Rahman et al., 2020). Sikap yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan atau tanggapan responden terhadap perkawinan anak.

1.5.5. Kondisi Sosial Ekonomi (Variabel X2)

Kondisi sosial ekonomi setiap individu berbeda-beda dan bertingkat ada yang rendah maupun tinggi. Sumardi (2001:21) dalam (Basrowi and Juariyah, 2010) menjelaskan kondisi sosial ekonomi merupakan sebuah kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang di posisi tertentu dalam masyarakat. Selain itu, pemberian posisi tersebut disertai dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh pemilik status tersebut. Soerjono Soekanto dalam (Hidayatullah, 2016), kondisi sosial ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat

berkaitan dengan orang lain berupa lingkungan pergaulan, prestasi, serta hak dan kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi merupakan keadaan sosial setiap individu di dalam sebuah kelompok masyarakat dan mendorong individu untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang dimilikinya.

1.5.5.1.Parameter Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Cohen dan Uphoff (1980) juga menjelaskan ciri-ciri latar belakang individu yang mendukung jenis dan kegiatan partisipasi diantaranya adalah:

- a. Usia dan jenis kelamin
- b. Status keluarga
- c. Tingkat pendidikan
- d. Pembagian sosial
- e. Pekerjaan
- f. Tingkat pendapatan
- g. Lama tinggal dan jarak
- h. Status kepemilikan tanah

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ernovianthy & Yasa (2014) mengukur pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap partisipasi masyarakat menggunakan aspek umur, status kependudukan, tingkat pendidikan, pendapatan rumah tangga, status

pekerjaan, serta status kepemilikan rumah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Langinan et al. (2018) menganalisis pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan menggunakan Indikator kondisi sosial ekonomi yaitu: tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan jumlah pendapatan.

Dari pernyataan tersebut maka penelitian ini mengukur kondisi sosial ekonomi dalam pencegahan perkawinan anak menggunakan beberapa indikator, yaitu: tingkat pendidikan, pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Indikator ini didukung oleh pendapat menurut Cohen dan Uphoff (1980) yang menyatakan bahwa karakteristik latar belakang partisipan perlu diketahui untuk mendukung kegiatan partisipasi masyarakat, yaitu: usia dan jenis kelamin, status keluarga, tingkat pendidikan, pembagian sosial, pekerjaan, tingkat pendapatan, lama tinggal dan jarak, serta status kepemilikan rumah. pekerjaan, tingkat pendapatan, dan lama tinggal.

1.5.6. Tingkat Pendidikan

Pendidikan menurut Sumarto (2009: 122) merupakan suatu proses dimana kelompok-kelompok sosial mentransmisikan nilai-nilai kepada generasi selanjutnya. Sedangkan menurut Carter V. Good (2005) (dalam A. Rahmat, 2014: 13), pendidikan adalah seni, praktek, atau profesi sebagai pengajar, serta ilmu yang sistematis atau pengajaran berkaitan dengan prinsip dan metode-metode mengajar, dan pengawasan, bimbingan murid.

Pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Indikator tingkat pendidikan yang diukur adalah tingkat pendidikan formal berdasarkan jenjang pendidikan sesuai dengan UU SISDIKNAS, yaitu

- a. pendidikan dasar (SD/MI/ Sederajat & SMP/MTs/Sederajat),
- b. pendidikan menengah (SMA/SMK/Sederajat),
- c. Pendidikan tinggi (diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor).

1.5.6.1.1. Pekerjaan

Pekerjaan menurut KBBI adalah penelaahan secara mendalam dan sistematis terhadap suatu pekerjaan, yang dapat memberikan keterangan tentang tugas, tanggung jawab, dan sifat pekerjaan, untuk dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik. Pekerjaan merupakan aktivitas sosial, dimana individu atau kelompok melaksanakan upaya selama waktu dan ruang tertentu dengan mengharapkan imbalan dan penghargaan ataupun tanpa imbalan (Meisartika & Safrianto, 2021). Pekerjaan merupakan suatu keterampilan komprehensif dan profesional yang perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu, selain itu pekerjaan merupakan usaha untuk mempertahankan kehidupan dan kedudukan.

Jenis pekerjaan merupakan macam-macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja. Menurut Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) (2014), jenis pekerjaan diklasifikasikan sebagai berikut (ISCO-08, 2012):

- a. Tenaga profesional, teknis, dan sejenisnya, contohnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), guru, dokter, dosen, dan lainnya.
- b. Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, contohnya adalah sekretaris, bagian administrasi, dan lainnya.
- c. Tenaga tata usaha dan sejenisnya, contohnya tata usaha perkantoran umum, tata usaha pelayanan pelanggan, dan lainnya.
- d. Tenaga usaha penjualan, contohnya penjual toko, *salesman*, dan lainnya
- e. Tenaga usaha jasa, contohnya tukang jahit, tukang cukur, sopir, dan lainnya
- f. Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan, contohnya adalah petani/pekebun, peternak, dan lainnya.
- g. Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar, contohnya adalah pekerja pabrik, buruh pabrik, buruh kuli, dan lainnya
- h. lainnya

Indikator pekerjaan yang akan digunakan untuk mengamati pekerjaan orang tua remaja dengan perkawinan anak yang akan menjadi responden penelitian. Pekerjaan yang digunakan diantaranya adalah: pekerja profesional (PNS/Karyawan Swasta), tenaga usaha penjualan dan jasa (Pedagang), dan tenaga usaha pertanian/kehutanan/perburuan/perikanan (Petani/Peternak).

1.5.6.1.2. Tingkat Pendapatan

Pendapatan menurut Raharja dan Manurung (2010) (dalam Iskandar, 2017) menyatakan bahwa pendapatan merupakan jumlah total penerimaan yang dapat berupa uang maupun bukan uang oleh seseorang atau rumah tangga tertentu selama rentang waktu tertentu. Selain itu, menurut Sumardi (1982) (dalam Jaya et al., 2020) menyatakan bahwa pendapatan merupakan penghasilan yang berupa uang dan diberikan kepada subjek ekonomi karena telah melaksanakan pekerjaan dengan baik yang didasarkan pada kemampuan dan profesi yang dimiliki. Menurut BPS, pendapatan digolongkan ke dalam 4 kategori, diantaranya:

- a. Golongan pendapatan sangat tinggi, yaitu dengan rata-rata pendapatan lebih dari >Rp. 3.500.000 per bulan
- b. Golongan pendapatan tinggi, yaitu dengan rata-rata pendapatan antara >Rp. 2.500.000 s/d Rp. 3.500.000 per bulan
- c. Golongan pendapatan sedang, yaitu dengan rata-rata pendapatan antara >Rp. 1.500.000 s/d Rp. 2.500.000 per bulan
- d. Golongan pendapatan rendah, yaitu dengan rata-rata pendapatan dibawah <Rp. 1.500.000 per bulan

1.5.7. Perkawinan Anak

Definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF), perkawinan anak adalah perkawinan formal atau informal di mana salah satu atau kedua belah pihak berusia di bawah 18 tahun. IPPF(2007) mendefinisikan perkawinan anak sebagai perkawinan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap perkawinan dan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan tersebut diubah karena perbedaan batas minimal usia menikah antara perempuan dan laki-laki menimbulkan diskriminasi. Hal ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional yang mewajibkan adanya wajib belajar 12 tahun. Selain itu, pasal tersebut tidak sinkron dengan UU Perlindungan anak yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Sedangkan dispensasi kawin dilakukan perubahan karena batas minimal usia menikah yang tidak jelas akan memberikan peluang adanya penyimpangan terhadap batas usia minimum perkawinan. Pasal ini perlu dipertegas dan dipastikan agar tidak digunakan sebagai alasan oleh kedua belah pihak orang tua mempelai untuk mengawinkan anak mereka yang masih di bawah umur.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia ideal untuk menikah adalah umur 21-35 tahun bagi laki-laki dan perempuan, hal ini dikarenakan pada usia tersebut telah mencapai kematangan reproduksi dan psikologi mempelai. Apabila seorang perempuan menikah di usia kurang dari 20 tahun berdampak negatif pada kesehatan reproduksinya, seperti peningkatan angka kematian ibu, kematian bayi, derajat kesehatan ibu dan anak yang rendah, serta potensi yang besar terjadinya bayi lahir stunting. Selain itu, dampak perkawinan anak secara sosial dapat meningkatkan masalah perekonomian keluarga atau meningkatkan potensi lahirnya keluarga miskin baru, meningkatkan angka perceraian, dan meningkatkan potensi terjadinya eksploitasi dan kekerasan pada anak.

Perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak, artinya melanggar hak asasi manusia karena hak anak termasuk bagian dari HAM. Hak anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, artinya secara tidak langsung perkawinan anak merupakan bagian pengaturan dari perlindungan anak. Di Jawa Tengah pencegahan dan penanganan perkawinan anak diatur dalam Pasal 84 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang berbunyi pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanganan perkawinan anak.

Pemerintah Kecamatan Bruno bekerjasama dengan berbagai stakeholder salah satunya dengan BKKBN melakukan beberapa upaya pemberdayaan masyarakat guna mencegah dan mengatasi perkawinan anak di daerahnya. Upaya yang dilakukan berupa:

- a. sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan melalui kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah dan kelompok PIK-R,
- b. mengoptimalkan peran kader IMP dalam setiap forum pertemuan di masing-masing desa, mengadvokasi kepala desa dimasing-masing wilayahnya untuk ikut mendukung program KB yang termasuk di dalamnya Pendewasaan Usia Perkawinan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat,
- c. bersinergi dengan KUA melalui BP4 dalam nasehat perkawinan untuk meningkatkan kualitas perkawinan, mengoptimalisasi kader TPK dalam mendampingi keluarga dan catin,
- d. kegiatan BRUS yang dilakukan KUA bekerja sama dengan sekolah-sekolah.

1.5.8. Hubungan Antar Variabel

1.5.8.1. Hubungan Antara Variabel Budaya Masyarakat (X1) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)

Penelitian ini akan membuktikan bahwa terdapat pengaruh variabel budaya masyarakat (X1) terhadap variabel partisipasi masyarakat (Y). Sedangkan Draiono dalam (Santropoetro, 1986: 22) menyatakan bahwa faktor ideal yang menjamin keberhasilan suatu program dan tercapainya partisipasi masyarakat secara menyeluruh adalah dipengaruhi oleh aspek budaya, kebiasaan, tradisi, dan sistem nilai yang ada di masyarakat.

Santoso Santropoetro (1986) berpendapat bahwa unsur-unsur penting yang menentukan partisipasi masyarakat salah satunya adalah perubahan sikap, dalam hal ini menyangkut aspek sikap (*attitude*) dan opini. Syamaun (2019: 85) menyatakan bahwa kebudayaan dapat membentuk, memperkuat dan mengubah sikap dan perilaku baik secara individu maupun sosial (Anderson et al., 2022). Santropoetro menjelaskan *attitude* sosial merupakan cara atau kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap suatu objek sosial dan dilakukan oleh sekelompok masyarakat.

Cohen dan Uphoff (1980) menyatakan bahwa latar belakang atau karakteristik individu dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat diantaranya adalah tingkat pendidikan. Slamet (1985) dalam (Mardikanto & Soebiato, 2017) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ditentukan

oleh kemampuan untuk menemukan dan memahami atau pengetahuan tentang kesempatan untuk membangun. Pendapat yang sama menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1995) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan juga berarti kemampuan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan. Dalam hal ini budaya dan pendidikan memiliki kesamaan karena menurut E. B. Taylor, budaya adalah keseluruhan kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat.

Dari pernyataan para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara variabel Budaya Masyarakat (X1) dengan variabel partisipasi masyarakat (Y).

1.5.8.2. Hubungan Antara Variabel Kondisi Sosial Ekonomi (X2) Terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)

Penelitian ini akan membuktikan adanya pengaruh antara variabel kondisi sosial ekonomi masyarakat (X2) terhadap variabel partisipasi masyarakat (Y). Kondisi sosial ekonomi masyarakat berkaitan dengan kedudukan seseorang didalam suatu masyarakat berkaitan dengan orang lain berupa lingkungan pergaulan, prestasi, serta hak dan kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya. Menurut Slamet (1985) kemampuan untuk melaksanakan pembangunan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki (Mardikanto & Soebiato, 2017; 92). Selain itu Slamet (1994: 97,137) menyatakan bahwa faktor internal yang

mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah: jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, lama tinggal, jarak, dan sentralisasi.

Dalam partisipasi masyarakat, menurut Cohen dan Uphoff (1980) latar belakang individu yang mendukung terjadinya partisipasi diantaranya adalah usia dan jenis kelamin, status keluarga, tingkat pendidikan, pembagian sosial, pekerjaan, tingkat pendapatan, lama tinggal dan jarak, dan status kepemilikan tanah.

Sedangkan Draiono dalam (Sanstropetro, 1986: 22) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah pendidikan, kemampuan dalam membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan sosial dan kepercayaan diri. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo (1995) yang menyatakan bahwa salah satu hal penting yang mendapat perhatian administrasi pembangunan dalam rangka partisipasi adalah pendidikan. Tingkat pendidikan yang memadai akan menciptakan kesadaran yang lebih tinggi dalam berwarga negara dan memudahkan dalam pengembangan identifikasi tujuan-tujuan pembangunan. Tingkat pendidikan juga diartikan sebagai tingkat kemampuan masyarakat untuk menyelenggarakan pembangunan.

Menurut Keith Davis (dalam Sastropetro 1986:41) syarat untuk dapat melaksanakan partisipasi adalah memiliki kemampuan berupa pemikiran dan pengalaman yang sama serta kemampuan komunikasi timbal balik. Artinya, implementor kebijakan termasuk di dalamnya masyarakat harus memiliki pendidikan dan pengetahuan agar dalam penyampaian kebijakan dapat dipahami dengan baik

oleh masyarakat dan tidak membingungkan masyarakat. Dari pernyataan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kondisi sosial ekonomi masyarakat (X2) berpengaruh terhadap variabel partisipasi masyarakat (Y).

1.5.8.3. Hubungan Antara Variabel Budaya Masyarakat(X1) dan Kondisi Sosial Ekonomi (X2) Terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan memfokuskan masyarakat pada pembangkitan ide dan gagasan, perumusan dan penilaian pilihan, serta membuat pilihan (Cohen & Uphoff, 1980). Hal ini tidak dapat tercapai tanpa adanya kemampuan dan kesempatan masyarakat berpartisipasi, diantaranya adalah kemampuan untuk memahami kesempatan berpartisipasi dan kemampuan memecahkan masalah, dimana kemampuan tersebut dipengaruhi pendidikan dan keterampilan masyarakat (Mardikanto & Soebiato, 2017: 93).

Menurut Darjono, faktor ideal dalam menjamin keberhasilan setiap program adalah dengan mengadakan suara aklamasi dalam proses pengambilan keputusan (Sastropetro, 1986: 21). Akan tetapi, faktor ideal tersebut bergantung pada aspek budaya, kebiasaan, tradisi dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Permasalahan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah forum partisipasi yang kurang melibatkan mereka yang kurang artikulatif, seperti kelompok perempuan, masyarakat yang tergolong usia muda, dan kelompok yang kurang berpendidikan (Sumarto, 2003: 153). Cara untuk menguatkan peran mereka yang kurang artikulatif dapat menggunakan metode atau teknik yang dapat digunakan

untuk melibatkan masyarakat tanpa harus banyak berbicara (Sumarto, 2003: 153). Hal ini didapat diartikan perlunya pendidikan dan pemahaman yang baik bagi fasilitator forum mengenai metode dan teknik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu juga bisa dengan penguatan *civil society* melalui peningkatan pemahaman pendidikan (Anggara, 2014: 229).

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan dan kondisi sosial ekonomi yang rendah secara sukarela akan berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan (Mardikanto & Soebiato, 2017: 83). Sedangkan masyarakat di atasnya beberapa hanya memperoleh manfaatnya dari hasil pembangunan dan beberapa berpartisipasi melalui sumbangan dana dan ikut berbagi tanggung jawab. Sejalan dengan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan, menurut Slamet (1985) masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang tinggi cenderung hanya memanfaatkan hasil pembangunan atau menyumbang gagasan/ide dan dana. Sedangkan masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah terlibat dalam pembangunan melalui sumbangan tenaga (Mardikanto & Soebiato, 2017: 85-86).

Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi sangat diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan (Mardikanto & Soebiato, 2017: 83). Dukungan positif masyarakat terhadap apa yang dihasilkan ditunjukkan melalui sikap ikut memelihara dan melestarikan hasil yang telah dicapai, artinya program yang dilaksanakan telah

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, program yang diselenggarakan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat memunculkan sikap apatisme dan tidak adanya perasaan ikut memiliki. Hal ini dikarenakan tidak semua lapisan masyarakat ikut dengan intens dan kapasitas yang sama dalam semua tahap penyelenggaraan program, penyebabnya adalah adanya perbedaan kemampuan, perbedaan kepentingan, dan perbedaan keahlian. Oleh karena itu, dalam partisipasi seseorang bisa terlibat sesuai dengan relevansinya, misalnya adalah sesuai dengan keahliannya, kepentingannya, atau tingkat kemampuannya (Kaho, 2002: 117).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, terdapat pengaruh antara variabel budaya masyarakat (X1) dan variabel kondisi sosial ekonomi (X2) terhadap partisipasi masyarakat.

1.5.9. Variabel Bebas

- a. Partisipasi budaya masyarakat diukur menggunakan indikator pengetahuan dan sikap.
- b. Kondisi sosial ekonomi yang menjadi penyebab perkawinan anak diukur berdasarkan tingkat pendapatan, pekerjaan, dan tingkat pendapatan.

1.5.10. Variabel Terikat

- a. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan anak diukur berdasarkan indikator keterlibatan dalam perencanaan/pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan.

1.6. Hipotesis

Hipotesis awal (Ho):

Ho: Tidak ada pengaruh antara Budaya Masyarakat (X1) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)

Ho: Tidak ada pengaruh antara Kondisi Sosial Ekonomi (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)

Ho: Tidak ada pengaruh antara Budaya Masyarakat (X1) dan Kondisi Sosial Ekonomi (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)

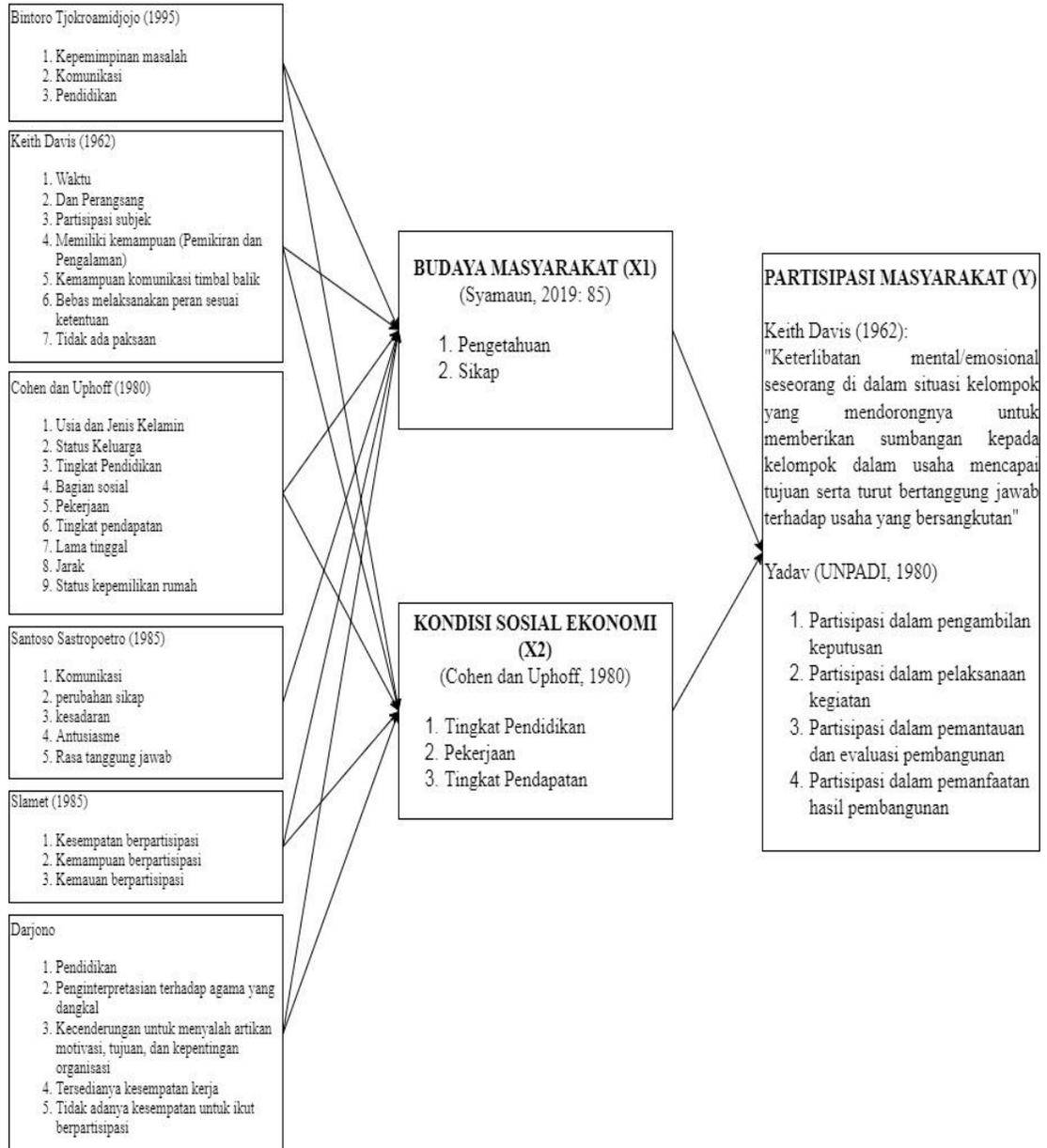
Hipotesis alternatif (Ha):

H1: Terdapat pengaruh antara Budaya Masyarakat (X1) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)

H2: Terdapat pengaruh antara Kondisi Sosial Ekonomi (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)

H3: Terdapat pengaruh antara Budaya Masyarakat (X1) dan Kondisi Sosial Ekonomi (X2) terhadap Partisipasi Masyarakat (Y)

1.7. Kerangka Teori



Gambar 1.1 Kerangka Teori
Sumber: Diolah Peneliti, 2023

1.8. Definisi Konsep

a. Partisipasi Masyarakat

Keith Davis (1962) (dalam Sastropetro, 1985: 13) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan mental dan emosional individu di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan kelompok dan ikut bertanggung jawab terhadap usaha di dalamnya.

b. Budaya Masyarakat

Menurut E. B. Taylor (dalam Sihotang, 2005: 12), budaya adalah suatu keseluruhan kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum adat istiadat, dan kemampuan yang lainnya serta kebiasaan yang didapat orang tua sebagai anggota masyarakat.

c. Kondisi Sosial Ekonomi

Sumardi (2001:21) dalam (Basrowi and Juariyah, 2010) menjelaskan kondisi sosial ekonomi merupakan sebuah kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang di posisi tertentu dalam masyarakat disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dijalankan.

1.9. Definisi Operasional

Variabel partisipasi masyarakat, dalam pengertian partisipasi masyarakat menurut Keith Davis (1962) (dalam Sastropetro, 1985: 13) variabel ini dapat diukur dari beberapa indikator, yaitu:

Tabel 1.3 Definisi Operasional Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak (Y)

| Variabel | Indikator | Dimensi | Deskriptor | No. Item |
|--|--------------|-------------|--|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak (Y) Keith Davis (1962); Yadav (UNPADI, 1980) | keterlibatan | Perencanaan | Kehadiran dalam rapat | 1 |
| | | | Kesempatan untuk menyampaikan ide dan gagasan | 2 |
| | | | Dukungan terhadap kegiatan | 3 |
| | | Pelaksanaan | Ikut dalam kegiatan pencegahan perkawinan anak | 4 |
| | | | Kesempatan untuk menyumbang tenaga dan waktu | 5 |
| | | Pemanfaatan | Manfaat yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan pencegahan perkawinan anak | 6 |
| | | | Menerapkan manfaat yang diperoleh | 7 |

Sumber: Diolah peneliti, 2023

Variabel Budaya, menurut Syamaun (2019: 85) adalah budaya membentuk pengetahuan yang diikuti dengan afeksi (perasaan) dan pada akhirnya akan membawa pada kesiapan untuk menerima atau menolak (sikap).

Tabel 1.4 Definisi Operasional Budaya Masyarakat (X1)

| Variabel | Indikator | Dimensi | Deskriptor | No. Item |
|---|-------------|-----------------------------|---|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Budaya Masyarakat (XI) Syamaun (2019: 85) | Pengetahuan | Perkawinan sesuai ketentuan | Pemahaman masyarakat terkait perkawinan anak | 8 |
| | | | Penyebab perkawinan anak | 9 |
| | | | Batas minimal usia perkawinan | 10 |
| | | | Dampak perkawinan anak | 11 |
| | Sikap | Tanggapan | Anak harus sekolah daripada menikah | 12 |
| | | | Sebutan " <i>prawan tua</i> " untuk anak perempuan yang telah pantas menikah tetapi belum menikah | 13 |
| | | | Perempuan tidak boleh mengenyam pendidikan lebih tinggi daripada laki-laki | 14 |
| | | | Peran perempuan dalam keluarga | 15 |
| | | | Menikah untuk menghindari hal-hal negatif dan zina | 16 |

Sumber: Diolah peneliti, 2023

Variabel kondisi sosial ekonomi menurut Cohen dan Uphoff (1980), yaitu:

Tabel 1.5 Definisi Operasional Kondisi Sosial Ekonomi (X2)

| Variabel | Indikator | Dimensi | Deskriptor | No. Item |
|---|--------------------|--|---------------------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Kondisi Sosial Ekonomi (X2) Cohen dan Uphoff (1980) | Tingkat Pendidikan | Karakteristik tingkat pendidikan orang tua | Jenjang pendidikan | 17 |
| | | Tingkat keterlibatan orang tua berdasarkan tingkat pendidikan | | |
| | Pekerjaan | Karakteristik pekerjaan orang tua | Jenis pekerjaan | 18 |
| | | Tingkat keterlibatan berdasarkan pekerjaan orang tua | | |
| | Tingkat pendapatan | Karakteristik golongan pendapatan orang tua | Golongan pendapatan | 19 |
| | | Tingkat keterlibatan berdasarkan golongan pendapatan orang tua | | |

Sumber: Diolah peneliti, 2023

1.10. Metode Penelitian

1.10.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2022: 15), metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan pada saat meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dan tujuan penelitiannya untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori. Hal ini dikarenakan peneliti ingin menguji hubungan sebab akibat antara variabel tingkat pendidikan dan kondisi sosial ekonomi (variabel bebas) dengan variabel partisipasi masyarakat (variabel terikat). Oleh karena itu untuk menganalisa hubungan sebab akibat antar variabel tersebut, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui pengujian hipotesis.

1.10.2. Populasi dan Sampel

1.10.2.1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2022: 130) merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan menurut Margono (2004) (dalam Hardani et al., 2020) merupakan keseluruhan objek penelitian baik manusia dan makhluk hidup lainnya, serta benda-benda maupun peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Bruno, yaitu orang tua yang memiliki (putra/putri) yang menikah dini.

1.10.2.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2022: 131). Dalam penelitian kuantitatif, jumlah sampel yang ditentukan berdasarkan pada populasi yang ada (Hardani et al., 2020: 240). Oleh

karena itu, sampel yang diambil harus mewakili setiap populasi (Sugiyono, 2022: 131). Populasi penelitian berdasarkan data dispensasi kawin Kecamatan Bruno pada tahun 2022 adalah 95 orang. Hal ini sesuai dengan data dispensasi kawin Kecamatan Bruno pada tahun 2022, yaitu sebanyak 95 orang (Mustahal, 2023). Menurut Gay, Mills dan Airasian (2009: 133), Penghitungan jumlah sampel menyatakan bahwa pada penelitian korelasi diperlukan sampel sebesar 30 responden (Alwi, 2012). Oleh karena itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 responden.

1.10.3. Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2022: 133-140) menjelaskan teknik pengambilan sampel dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *probability sampling* dengan metode *simple random sampling*. *Simple random sampling* dipilih karena populasi yang diambil relatif kecil dan homogen atau tidak memiliki strata, yaitu orang tua yang memiliki anak menikah di bawah umur.

Teknik yang digunakan adalah teori menurut Gay, Mills dan Airasian (2009: 133) yang menyatakan untuk penelitian eksperimen dan komparatif diperlukan 30 responden untuk masing-masing kelompok. Dari 18 desa di Kecamatan Bruno, dipilih secara *random* sebanyak 3 desa dengan jumlah perkawinan anak yang tinggi, yaitu Desa Brunorejo, Desa Gowong, dan Desa Blimbing. Kemudian setiap desa diambil sampel proporsinya sebanyak kurang lebih 10 orang per desa secara *random*.

1.10.4. Jenis dan Sumber Data

1.10.4.1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan bentuk data ordinal, yaitu data yang pengukurannya didasarkan pada rangking atau diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi hingga jenjang rendah (Riduwan, 2008: 7). Data ordinal yang digunakan berupa pilihan jawaban pada item instrumen yang diberikan nilai setiap indikatornya:

- 1 = Sangat Tidak Baik
- 2 = Tidak Baik
- 3 = Baik
- 4 = Cukup Baik
- 5 = Sangat Baik

1.10.4.2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dan data yang berasal dari sumber pertama.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah daya tambahan yang mendukung data primer dan bukan berasal dari sumber pertama atau sudah dibuat oleh orang lain terlebih dahulu.

1.10.5. Skala Pengukuran

Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan interval yang ada alat ukur (Sugiyono, 2022: 151). Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang berkaitan dengan gejala sosial (Riduwan, 2008: 12). Gejala sosial dalam penelitian telah ditentukan secara spesifik oleh peneliti yang disebut dengan variabel penelitian. Jawaban dalam skala likert pada penelitian ini menggunakan data berbentuk ordinal.

1.10.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui angket (kuisisioner), wawancara (interview), pengamatan (observasi), ujian (test), dan dokumentasi. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan angket (kuisisioner) dan dokumentasi.

Angket (kuisisioner) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara memberikan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab

(Riduwan 2008: 28). Angket dapat digunakan apabila jumlah responden yang dibutuhkan cukup besar dan tersebar luas. Angket dapat berupa pertanyaan atau pernyataan terbuka maupun tertutup dan dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui perantara lainnya. Hal ini sesuai dengan jumlah responden yang menjadi sampel penelitian, yaitu 30 responden dan cakupan luas wilayah meliputi masyarakat Kecamatan Bruno yang memiliki remaja (putra/putri) yang menikah dini.

1.10.7. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang sedang diamati (Sugiyono, 2022: 166). Arikunto (1995: 134) (dalam Riduwan, 2008: 26) menjelaskan instrumen adalah alat bantu yang dipilih untuk digunakan sebagai mengumpulkan data atau kegiatan agar menjadi lebih mudah dan sistematis. Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini adalah angket (kuisisioner) dengan jenis angket tertutup. Angket digunakan karena jumlah responden yang dibutuhkan cukup banyak.

1.10.8. Teknik Analisis

Teknis analisis data pada penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Statistik yang digunakan terdapat dua macam, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa statistik inferensial. Statistik inferensial merupakan teknik yang digunakan untuk

menganalisis data sampel dan hasilnya berlaku untuk populasi, sampel dapat berupa sampel yang diketahui maupun tidak diketahui jumlahnya (Sugiyono 2022: 228).

Statistik inferensial dibagi menjadi dua, yaitu statistik parametris dan nonparametris. Statistik parametris digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan statistik nonparametris digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Penelitian ini menggunakan jenis statistik non parametris karena data yang digunakan berbentuk ordinal.

1.10.8.1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2022: 2), validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Menurut Jogiyanto (2016: 38), validitas berhubungan dengan ketepatan instrumen atau alat ukur dalam melakukan tugasnya mencapai sasarannya. Penelitian ini menggunakan uji *Kendall-Tau* karena bentuk data yang digunakan adalah ordinal.

1.10.8.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Suatu pengukuran dikatakan dapat dipercaya apabila hasil dari pengukuran tersebut harus akurat dan konsisten (Jogiyanto, 2016: 39). Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha* (α) dengan rumus sebagai berikut (Sugiyono 2007: 365):

$$r_i = \frac{k}{k-1} \left[1 - \frac{\sum s_i^2}{s_t^2} \right]$$

Keterangan:

- r_i : koefisien reliabilitas
- k : banyaknya belahan tes
- s_i^2 : varians masing-masing skor
- s_t^2 : jumlah total

Rumus untuk menghitung varians adalah (Sugiyono 2007: 365):

$$s_t = \frac{\sum X_t^2}{n} - \frac{(\sum X_t)^2}{n^2}$$

Keterangan:

- X_t = Skor pada item
- $\sum X_t$ = Jumlah seluruh skor item
- $\sum X_t^2$ = Jumlah kuadrat seluruh skor item

1.10.8.3. Uji Korelasi

Uji korelasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur hipotesis asosiatif (sugiyono, 2022: 271). Salah satu jenis uji korelasi terhadap hipotesis asosiatif dengan data ordinal adalah menggunakan Korelasi *Kendal Tau*. Korelasi *Kendal Tau* digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua atau lebih variabel (Sugiyono 2022: 390). Rumus *Kendal Tau* (Sugiyono, 2007: 253)

$$\tau = \frac{\sum A - \sum B}{\frac{N(N-1)}{2}}$$

Keterangan:

- τ = Koefisien korelasi Kendal Tau
- A = Jumlah rangking atas
- B = Jumlah rangking bawah
- N = Jumlah anggota sampel

Hasil dari uji korelasi tersebut menunjukkan hubungan yang positif atau negatif. Hubungan korelasi yang positif artinya, semakin tinggi variabel yang mempengaruhi maka akan semakin tinggi juga variabel yang dipengaruhi. Sugiyono (2022: 274) menjelaskan untuk menginterpretasikan kuatnya hubungan antar variabel tersebut, maka dapat menggunakan pedoman sebagai berikut:

Tabel 1.6 Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

| Interval Koefisien | Tingkat Hubungan |
|--------------------|------------------|
| 0,00 – 0,199 | Sangat rendah |
| 0,20 – 0,399 | Rendah |
| 0,40 – 0,599 | Sedang |
| 0,60 – 0,799 | Kuat |
| 0,80 – 1,00 | Sangat kuat |

Sumber: Sugiyono, 2022: 274

Uji signifikansi digunakan untuk mengetahui apakah hubungan yang ditemukan dapat berlaku bagi seluruh populasi atau tidak. Rumus uji signifikansi dengan uji z (dalam Sugiyono, 2007: 230) adalah sebagai berikut:

$$z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}}$$

Keterangan:

Z = Signifikansi variabel

N = Jumlah sampel

τ = koefisien korelasi Kendall Taau

Berdasarkan perhitungan dari uji signifikansi tersebut dapat ditentukan penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan z hitung dengan z tabel, ketentuannya adalah apabila z hitung lebih besar daripada z tabel (z hitung $> z$ tabel), maka koefisien korelasi yang diujikan adalah signifikan atau dapat diberlakukan untuk seluruh populasi.